

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan berfokusnya peran pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap truk besar yang melebihi muatan dan dampaknya terhadap kerusakan jalan. Jalan merupakan infrastruktur penting yang mendukung mobilitas dan ekonomi, namun sering mengalami kerusakan akibat muatan truk yang berlebihan. Kebijakan seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 dan regulasi lainnya telah diterapkan untuk mengatasi masalah ini, namun implementasi yang masih kurang efektif menjadi perhatian. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pengawasan oleh Dinas Perhubungan dalam konteks regulasi dan nilai-nilai syariah, serta memberikan asyar untuk meningkatkan pengawasan dan menjaga keberlanjutan infrastruktur jalan di Kabupaten Blitar.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana peran pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap truk Besar yang melebihi muatan dan Berdampak pada kerusakan Jalan ? , 2. Bagaimana peran pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap truk Besar yang melebihi muatan dan Berdampak pada kerusakan Jalan di tinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri 18 Tahun 2021?, 3. Bagaimana peran pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap truk Besar yang melebihi muatan dan Berdampak pada kerusakan Jalan di tinjau dari Fiqih Siyasah.

Dalam hal ini bertujuan 1.Untuk mengetahui dan Memahami peran pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap truk Besar yang

melebihi muatan dan Berdampak pada kerusakan Jalan, 2. Untuk mengetahui dan Memahami peran pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap truk Besar yang melebihi muatan dan Berdampak pada kerusakan Jalan di tinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri 18 Tahun 2021, 3. Untuk mengetahui dan Memahami peran pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap truk Besar yang melebihi muatan dan Berdampak pada kerusakan Jalan di tinjau dari Fiqih Siyasah

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yuridis empiris, yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini dengan mengkaji pelaksanaan hukum di lapangan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Blitar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi peran pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap truk besar yang melebihi muatan serta dampaknya terhadap kerusakan jalan. Pengawasan ini mencakup inspeksi melalui jembatan timbang, asya berkala, dan pemantauan lapangan. Selain itu, implementasi teknologi seperti Weigh-in-Motion (WIM) juga mulai diterapkan untuk meningkatkan efisiensi. 2. Dalam konteks hukum, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 menjadi landasan utama yang mengatur penimbangan kendaraan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran muatan. 3. Peran ini, bila ditinjau dari perspektif fiqih siyasah, mencerminkan asya pemerintah dalam menjaga kemaslahatan umum dan keadilan sosial. Pengawasan terhadap truk ODOL (Over Dimension Over Loading) juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam memastikan

keselamatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan infrastruktur yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Kerusakan Jalan, Truk Bermuatan Lebih,, Pengawasan, Penegakan Hukum, , Operasi Jembatan Timbang, Edukasi, Weigh-in-Motion, Solusi.*

ABSTRACT

This research is motivated by the focus on the role of supervision by the Blitar Regency Transportation Department regarding overloaded large trucks and their impact on road damage. Roads are essential infrastructure that supports mobility and the economy but often suffer damage due to overloaded trucks. Policies such as Minister of Transportation Regulation Number PM 18 of 2021 and other regulations have been implemented to address this issue. However, the less effective implementation of these policies has become a concern. This study aims to evaluate the supervision conducted by the Transportation Department within the context of regulations and Islamic values and to provide solutions to improve supervision and maintain sustainable road infrastructure in Blitar Regency.

The research problems in this study are 1. What is the role of the Blitar Regency Transportation Department in supervising overloaded large trucks and their impact on road damage?, 2. How is the role of the Blitar Regency Transportation Department in supervising overloaded large trucks and their impact on road damage assessed under Minister of Transportation Regulation Number PM 18 of 2021?, 3. How is the role of the Blitar Regency Transportation Department in supervising overloaded large trucks and their impact on road damage assessed from the perspective of *Fiqh Siyasah*?

This study aims to 1. Identify and understand the role of the Blitar Regency Transportation Department in supervising overloaded large trucks and their impact on road damage, 2. Identify and understand the role of the Blitar Regency

Transportation Department in supervising overloaded large trucks and their impact on road damage under Minister of Transportation Regulation Number PM 18 of 2021. 3. Identify and understand the role of the Blitar Regency Transportation Department in supervising overloaded large trucks and their impact on road damage from the perspective of *Fiqh Siyasah*.

The research method used is a descriptive juridical-empirical approach, describing the phenomena currently occurring by examining the implementation of laws in the field. The research was conducted in Blitar Regency.

The results of this study show that 1. The study evaluates the role of the Blitar Regency Transportation Department in supervising overloaded large trucks and their impact on road damage. This supervision includes inspections through weighbridges, periodic raids, and field monitoring. Additionally, the implementation of technologies such as Weigh-in-Motion (WIM) is being introduced to improve efficiency., 2 In terms of legal context, Minister of Transportation Regulation Number PM 18 of 2021 serves as the main basis for regulating vehicle weighing and imposing sanctions on load violations., 3. From the perspective of *Fiqh Siyasah*, this role reflects the government's efforts to ensure public welfare and social justice. Supervision of ODOL (Over Dimension Over Loading) trucks is also aligned with Islamic principles to ensure public safety and community well-being through fair and sustainable infrastructure management.

Keywords: Road Damage, Overloaded Trucks, Monitoring, Law Enforcement, Weighbridge Operations, Education, Weigh-in-Motion, Solutions.